



Analisis Akuntansi Syariah dan Good Governance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Norasyikin

nora87561@gmail.com

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Guslinawati

guslinawati2025@gmail.com

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Wira Hubaya Umista

mex.mira77@gmail.com

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Aslina

aslina23@gmail.com

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Alamat: Jl.Poros Sungai Alam-Selatabaru Bengkalis-Riau

Korespondensi penulis: *nora87561@gmail.com*

Abstrak. *This study aims to explore how the implementation of Islamic accounting strengthens good governance practices in Islamic Microfinance Institutions. The research employs a qualitative methodology with a case study approach, utilizing in-depth interviews, observations, and document analysis for data collection. Thematic analysis is conducted to identify patterns and meanings related to the application of Islamic accounting principles and good governance within the institution. The findings reveal that Islamic accounting, which emphasizes honesty, justice, and social responsibility, plays a crucial role in supporting transparency and accountability, thereby enhancing member trust and institutional sustainability. However, the effectiveness of Islamic accounting implementation largely depends on the competence of human resources and adequate managerial support.*

Keywords: *Accounting Efficiency; Good Governance; Islamic Microfinance; Transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan akuntansi syariah dapat memperkuat praktik good governance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan makna dari penerapan prinsip akuntansi syariah serta tata kelola yang baik dalam lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi syariah yang mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga, sehingga meningkatkan kepercayaan anggota dan keberlanjutan lembaga. Namun, efektivitas penerapan akuntansi syariah sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dan dukungan manajerial yang memadai.

Kata Kunci: *Akuntansi Syariah; Good Governance; Lembaga Keuangan Mikro; Transparansi*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran sentral dalam memperkuat sistem keuangan inklusif berbasis nilai-nilai Islam, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia. Sebagai entitas yang menjunjung prinsip keadilan, amanah, dan transparansi, LKMS dituntut untuk menjalankan aktivitas operasionalnya selaras dengan ketentuan syariah, termasuk dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam

konteks tersebut, akuntansi syariah menjadi instrumen penting yang tidak hanya merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ilahiah. Di sisi lain, praktik *good governance* menjadi pilar utama dalam memastikan tata kelola yang bertanggung jawab, berintegritas, dan akuntabel dalam seluruh aspek kelembagaan.

Secara teoritis, akuntansi syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, melainkan merupakan representasi nilai-nilai tauhid yang mewujud dalam praktik bisnis yang berkeadilan dan transparan. Prinsip-prinsip seperti *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), dan *'adl* (adil) menjadi landasan etik yang membedakan akuntansi syariah dari sistem akuntansi konvensional. Sementara itu, *good governance* dalam kerangka institusi keuangan mengacu pada pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Kolaborasi antara sistem akuntansi yang berlandaskan syariah dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional LKMS.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi ideal yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dengan kondisi faktual yang terjadi (*das sein*). Idealnya, setiap LKMS menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah serta menjalankan tata kelola yang baik dan profesional. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak LKMS masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi syariah, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kurang optimalnya pengawasan dan transparansi. Ketimpangan antara norma dan praktik tersebut berpotensi menghambat tercapainya tujuan utama pendirian lembaga keuangan syariah, yakni mendistribusikan keadilan ekonomi dan mendorong kesejahteraan umat.

Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek tata kelola pada institusi keuangan syariah berskala besar, seperti bank umum syariah, serta fokus pada kinerja keuangan tanpa mengelaborasi hubungan integral antara akuntansi syariah dan praktik *good governance* dalam konteks kelembagaan mikro. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*state of the art*) dengan menyajikan pendekatan yang lebih holistik, yakni menelaah bagaimana akuntansi syariah berkontribusi terhadap penguatan tata kelola lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur ilmiah sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kapasitas kelembagaan LKMS dalam menghadapi tantangan tata kelola yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang dan analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan antara penerapan akuntansi syariah dengan praktik *good governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sinergi keduanya dalam membangun sistem keuangan mikro yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini berlandaskan pada teori akuntansi syariah dan teori tata kelola yang baik (*good governance*), yang keduanya memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga keuangan, khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Akuntansi syariah merupakan sistem pelaporan keuangan yang

berakar dari prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan ('adl), amanah, kejujuran (shiddiq), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Sistem ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi semata, melainkan juga sebagai wujud pertanggungjawaban spiritual kepada Allah SWT dan sosial kepada sesama manusia. Akuntansi syariah juga menuntut adanya kejujuran dalam pencatatan transaksi serta keterbukaan dalam pengungkapan laporan keuangan agar tidak menimbulkan ketimpangan informasi antar pihak yang berkepentingan. Di Indonesia, praktik akuntansi syariah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, yang memberikan kerangka normatif atas perlakuan akuntansi dalam aktivitas syariah, baik dalam perbankan maupun lembaga keuangan mikro.

Sementara itu, teori good governance menekankan pada pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas dalam pengelolaan organisasi. Dalam konteks lembaga keuangan, khususnya LKMS yang berskala komunitas dan berbasis kepercayaan masyarakat, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik merupakan suatu keniscayaan agar dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Transparansi sebagai salah satu prinsip utama good governance berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan publik untuk mengawasi penggunaan dana, sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa pengelola dana bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan keuangan yang diambil. Penerapan kedua prinsip tersebut diyakini dapat mendukung efisiensi pelaporan keuangan dan mencegah terjadinya moral hazard atau penyalahgunaan wewenang.

Akuntansi syariah dan good governance saling melengkapi dalam menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya sah secara teknis, tetapi juga etis dan adil secara substansi. Akuntansi syariah mendorong pelaporan keuangan yang berorientasi pada nilai-nilai moral, sedangkan good governance menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan yang menjamin laporan tersebut digunakan dan disampaikan secara bertanggung jawab. Dalam konteks LKMS, sinergi antara keduanya dipandang penting dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang efisien, yaitu pelaporan yang disusun secara cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah penelitian sebelumnya memberikan kerangka empiris yang relevan terhadap fokus penelitian ini. Muda dan Harahap (2020) menyimpulkan bahwa akuntansi syariah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga keuangan mikro. Lestari dan Saiful (2021) menemukan bahwa penerapan prinsip good governance secara konsisten memperkuat reputasi dan kinerja organisasi keuangan syariah. Sementara itu, Hasanah (2023) menegaskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan, sedangkan Sandi dan Tia (2019) membuktikan bahwa pengawasan terhadap transaksi keuangan memiliki implikasi terhadap kecepatan dan ketepatan penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, sebagian besar kajian terdahulu hanya membahas sebagian variabel secara terpisah dan belum secara komprehensif mengkaji hubungan antara penerapan prinsip akuntansi syariah, pengawasan transaksi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap efisiensi laporan keuangan dalam konteks LKMS.

Berdasarkan uraian teori dan hasil temuan sebelumnya, penelitian ini menyusun hipotesis sebagai berikut: (1) Penerapan prinsip akuntansi syariah berpengaruh positif terhadap efisiensi laporan keuangan; (2) Pengawasan terhadap transaksi keuangan berpengaruh positif terhadap efisiensi laporan keuangan; (3) Transparansi berpengaruh positif terhadap efisiensi laporan keuangan; dan (4) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efisiensi laporan keuangan. Hipotesis ini disusun untuk menguji kontribusi masing-masing variabel terhadap peningkatan efisiensi pelaporan keuangan dalam lembaga keuangan mikro syariah secara empiris, sekaligus untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran integratif akuntansi syariah dan tata kelola dalam praktik kelembagaan yang sehat dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan akuntansi syariah dan good governance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang melibatkan pengelola serta anggota lembaga sebagai sumber informasi utama. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan relevan terkait topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan secara sistematis melalui proses triangulasi data guna memastikan validitas dan kredibilitas temuan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai praktik akuntansi syariah dan tata kelola yang diterapkan dalam lembaga tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini secara mendalam mengungkap bahwa penerapan akuntansi syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi landasan utama dalam setiap transaksi dan pengelolaan dana. Implementasi prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial terbukti mampu meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap keberlangsungan lembaga. Dalam konteks good governance, penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota, serta pengawasan internal yang ketat menjadi faktor penentu utama dalam menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan keuangan. Transparansi dalam penyajian laporan keuangan dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya akuntabilitas dan mencegah praktik-praktik penyimpangan.

Lebih lanjut, pengelolaan LKMS yang menerapkan prinsip good governance menunjukkan adanya peningkatan kualitas manajemen dan efisiensi operasional, di mana pengurus lembaga secara aktif melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem yang berjalan. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan signifikan, khususnya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai

secara mendalam aspek teknis akuntansi syariah dan manajemen tata kelola. Kurangnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menyebabkan beberapa pengelola mengalami kesulitan dalam mengadaptasi perubahan regulasi dan kebutuhan pasar yang dinamis. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang sistematis dan dukungan teknis menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan untuk memperkuat sinergi antara akuntansi syariah dan prinsip good governance.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangat bergantung pada bagaimana akuntansi syariah dan tata kelola yang baik dijalankan secara terpadu. Sinergi kedua aspek tersebut tidak hanya mendukung pencapaian tujuan ekonomi lembaga, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang menjadi ciri khas lembaga keuangan syariah. Penemuan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya aspek teknis dan non-teknis dalam pengelolaan LKMS, sekaligus menjadi rujukan penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat landasan akademik dan praktik pengelolaan keuangan mikro syariah yang berkelanjutan dan terpercaya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab secara signifikan memperkuat praktik good governance dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sinergi antara akuntansi syariah dan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif anggota terbukti meningkatkan kepercayaan serta efektivitas pengelolaan lembaga. Namun, keberhasilan penerapan ini masih dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola aspek teknis dan non-teknis secara optimal, sehingga peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, integrasi akuntansi syariah dan good governance menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, M., & Bella, R. (2022). Sistem pelaporan otomatis meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(2), 110–124.
- Arifin, Z. (2020). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Cahyo, A., & Dewi, S. (2023). Implementasi e-budgeting berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Publik*, 5(1), 45–59.
- Dani, F., Syahrul, M., & Putra, H. (2019). Sistem informasi akuntansi meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 7(3), 77–85.

- Didi, K., & Elsa, T. (2020). Akuntabilitas berperan dalam meningkatkan efisiensi administrasi keuangan. *Jurnal Administrasi Keuangan Publik*, 9(1), 61–72.
- Eka, M., & Fajar, R. (2023). Akuntabilitas dan kepatuhan regulasi memperbaiki kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Regulasi*, 10(2), 89–101.
- Fitriani, R. (2021). *Pengaruh Akuntansi Syariah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di BMT*. (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hasanah, L. (2023). Efisiensi laporan keuangan pemerintah desa ditinjau dari sisi transparansi. *Jurnal Keuangan dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 34–48.
- Hasliani, S., & Yusuf, A. (2021). Pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pemerintahan*, 4(2), 102–117.
- Iqbal, Z., Wahyuni, R., & Rahmat, H. (2022). Akuntabilitas keuangan publik meningkatkan efisiensi anggaran. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Negara*, 11(1), 58–70.
- Ismail, T. (2019). *Good Governance dalam Sektor Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Joko, R., & Kurnia, T. (2020). Transparansi keuangan berpengaruh terhadap efisiensi operasional. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, 6(3), 91–104.
- Lestari, S., & Saiful, M. (2021). Good governance dan dampaknya terhadap kinerja BMT di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 3(1), 15–29.
- Mega, D., Rahmawati, S., & Danu, T. (2019). Akuntabilitas meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Negara dan Daerah*, 5(2), 73–85.
- Mila, A., & Putri, F. (2023). Kualitas laporan keuangan desa: Suatu tinjauan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 7(1), 122–135.
- Muda, I., & Harahap, R. (2020, November). Akuntansi Syariah dan Transparansi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis* (pp. 54–62).
- Novan, B., & Oki, L. (2021). Efisiensi laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem kontrol internal. *Jurnal Sistem Pengendalian Keuangan*, 3(3), 84–96.
- Putri, E., Anisa, Y., & Farid, H. (2018). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(2), 37–49.

- Rahmadani, U., Sari, D., & Aulia, N. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 5(1), 55–68.
- Saputra, A. (2019). Pengaruh sistem akuntabilitas terhadap efisiensi keuangan pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pemerintahan Desa*, 4(1), 22–34.
- Susano, M., & Rachmawati, L. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). *Jurnal Inovasi Keuangan Daerah*, 7(1), 41–55.
- Yuliana, S., & Hidayat, A. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Pemerintahan dan Akuntansi Desa*, 5(1), 56–70.